

SKRIPSI
TANTANGAN DAN PELUANG PELAKSANAAN
OTONOMI DAERAH KOTA SOLOK DITINJAU DARI
ASPEK PEMENUHAN HAK KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT

(Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum)



FAKULTAS
HUKUM
UNIVERSITAS
ANDALAS
PADANG
2025

	No. Alumni Universitas	Irfan Hijra	No. Alumni Fakultas
	a. Tempat/Tgl Lahir : Selayo/ 09 November 2001 b. Nama Orangtua : Ilva Weli c. Fakultas : Hukum d. PK : Hukum Tata Negara e. No. BP : 2110113120	f. Tanggal Lulus : 17 Juni 2025 g. Predikat Lulus : Dengan Pujian h. Lama Studi : 3 Tahun 10 bulan i. IPK : 3,60 j. Alamat : Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten. Solok, Sumatera Barat	

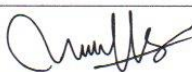
**TANTANGAN DAN PELUANG PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH KOTA SOLOK
DITINJAU DARI ASPEK PEMENUHAN HAK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**
(Irfan Hijra, 2110113120, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 74 halaman, 2025)

ABSTRAK

Otonomi daerah memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat secara mandiri. Kota Solok, sebagai salah satu daerah otonom, menghadapi tantangan dalam implementasi kebijakan ini, seperti ketimpangan pembangunan antarwilayah, keterbatasan sumber daya manusia, serta ketergantungan tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Adapun rumusan masalah yang penulis angkat. *Pertama*, Bagaimana Pelaksanaan Otonomi Daerah Pada Pembangunan dan Pelayanan Publik di Kota Solok ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah?. *Kedua*, Bagaimana Tantangan dan Peluang dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kota Solok ditinjau dari aspek pemenuhan Hak Kesejahteraan Masyarakat?. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif-analitis. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa. *Pertama*, Dari aspek pembangunan dan pelayanan publik, pemerintah Kota Solok telah berupaya meningkatkan kualitas infrastruktur, layanan kesehatan, dan pendidikan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan yang berkelanjutan menjadi prinsip utama dalam pengelolaan daerah, dengan fokus pada pemerataan akses terhadap fasilitas umum serta penguatan daya saing daerah. Namun, masih terdapat tantangan berupa ketimpangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pinggiran, di mana wilayah pusat kota lebih mendapatkan perhatian dibandingkan daerah pinggiran yang masih memiliki keterbatasan infrastruktur dasar. *Kedua*, terkait dengan tantangan dan peluang dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemenuhan hak kesejahteraan masyarakat masih menghadapi berbagai kendala, seperti ketergantungan pada dana transfer pusat, keterbatasan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan implementasi kebijakan daerah. Ketergantungan Kota Solok terhadap dana transfer dari pusat menyebabkan keterbatasan dalam fleksibilitas anggaran untuk menjalankan program-program pembangunan yang lebih inovatif dan berbasis kebutuhan lokal. Oleh karena itu, peningkatan PAD menjadi prioritas utama agar pemerintah daerah lebih mandiri dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan pembangunan.

Kata Kunci: Otonomi Daerah, Kesejahteraan Masyarakat

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada 17 Juni 2025.
Penguji,

Tanda Tangan	1. 	2.
Nama Terang	M Nurul Fajri, S.H, M.H.	Prima Widya Putri, S.H., M.H.

Mengetahui,
Ketua Departemen Hukum Tata Negara: Arfiani, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas	Nama:	Tanda Tangan:



Alumni University Number		Irfan Hijra	Alumni University Number
a.	Place/Date of Birth : Selayo/09 th November 2001	f.	Graduation Date : 17 th June 2025
b.	Parents' Name : Ilva Weli	g.	Pass Predicate : Cumlaude
c.	Faculty : Law	h.	Length of Study : 3 years 10 month
d.	Concentration : Constitutional Law	i.	GPA : 3,60
e.	Student ID : 2110113120	j.	Address : Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten. Solok, Sumatera Barat

CHALLENGES AND OPPORTUNITIES IN IMPLEMENTING REGIONAL AUTONOMY IN SOLOK CITY REVIEWED FROM THE ASPECT OF FULFILLING COMMUNITY WELFARE RIGHTS

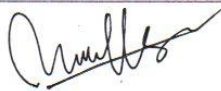
(Irfan Hijra, 2110113120, Faculty of Law, Andalas University, 74 Pages, 2025)

ABSTRACT

Regional autonomy gives authority to local governments to regulate and manage the interests of local communities independently. Solok City, as one of the autonomous regions, faces challenges in implementing this policy, such as disparities in development between regions, limited human resources, and high dependence on transfer funds from the central government. The formulation of the problem that the author raises. First, How is the Implementation of Regional Autonomy in Development and Public Services in Solok City reviewed from Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government?. Second, What are the Challenges and Opportunities in the Implementation of Regional Autonomy in Solok City reviewed from the aspect of fulfilling Community Welfare Rights?. This study uses an empirical legal method with a descriptive-analytical approach. This study concludes that. First, From the aspect of development and public services, the Solok City government has made efforts to improve the quality of infrastructure, health services, and education in order to improve community welfare. Sustainable development is the main principle in regional management, with a focus on equal access to public facilities and strengthening regional competitiveness. However, there are still challenges in the form of development disparities between urban and suburban areas, where the city center area receives more attention than the suburban areas that still have limited basic infrastructure. Second, related to the challenges and opportunities in the implementation of regional autonomy, the fulfillment of people's welfare rights still faces various obstacles, such as dependence on central transfer funds, limited Regional Original Income (PAD), and lack of community participation in monitoring and implementing regional policies. Solok City's dependence on transfer funds from the center causes limitations in budget flexibility to run more innovative development programs based on local needs. Therefore, increasing PAD is a top priority so that local governments are more independent in formulating and implementing development policies.

Keywords: Regional Autonomy, Public Welfare

This minor thesis has defended in front of the examiner team at Juni 17th, 2025. Examiner,

Signature	1. 	2.
Name	M Nurul Fajri, S.H, M.H.	Prima Widya Putri, S.H., M.H.

Acquainted,

Head of the Department of Constitutional Law: Arfiani, S.H., M.H.

Signature

Alumni has been registered in the faculty/university under the number:

Faculty/University Officer	
No. Alumni Faculty	Name: Signature:
No. Alumni University	Name: Signature: